



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2022

JUM'AT,
EDISI ;

14 JANUARI 2022
00226528/GBP/II/2022

KLIPING

Berita Pertanian



GUNTINGAN BERITA DAN PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

JUM'AT, 14 JANUARI 2022

I. BERITA-BERITA MENGENAI PERTANIAN :

1. HORTIKULTURA :
 - Rimbunnya Anggur di Kota Tangsel (K)..... 1-2
2. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN :
 - Kementan tekan Impor Daging Sapi (R)..... 3-4
 - Pemerintah Tetapkan kuota Impor Daging Sapi 266 Ribu Ton (ID)..... 5-6
 - Daging Sapi Impor Kembali Geruduk Pasar Lokal (KN)..... 7-8
 - Kuota Impor Daging Menyusut (BI)..... 9-11
3. PERKEBUNAN :
 - Pemerintah Disarankan Buat DMO Minyak Sawit (R)..... 12
 - PTPN VIII Komit Jaga Lahan Konsevasi di Kebun Sawit (ID)..... 13
 - Distribusi Bakal Diatur Ketat (K)..... 14-15
4. PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN :
 - Izin Distributor Bisa Dicabut (BI)..... 16
 - Naikin Subsidi Pupuk 2x Lipat (RM)..... 17
 - BUMN Pastikan Stok Pupuk Subsidi Aman (ID)..... 18
5. KETAHANAN PANGAN :
 - Harga Minyak Goreng Terus Naik (MI)..... 19
 - Dilemma Penjual Tempe Saat Kedelai Naik (KN)..... 20
 - Warga Berburu Minyak Goereng Murah (R)..... 21-22
 - Langka, Pembelian Minyak Goreng Dibatasi (SI)..... 23-24

II. PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

ARTIKEL DAN OPINI :

- Ironi Harga Minyak Goreng (R)..... 25

oooooooo O ooooooooo

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☒ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 14 / 1 / 2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 12 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

Rimbunnya Anggur di Kota Tangsel

Fransiskus Wisnu Wardhana Dhany

Keterbatasan lahan tidak menyurutkan insting petani warga Tangerang Selatan, Banten. Selama pandemi Covid-19, tersebut menciptakan rantai ekonomi yang menggerakkan sektor riil di Kota Makassar.

Sekitar 100 warga menyemarakkan Balai Penyuluhan Pertanian Jombang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (13/1/2022) pagi. Mereka kompak mengenakan kaus hitam bertuliskan Komunitas Anggur Tangsel.

Para pegiat hortikultura ini tengah merayakan dua tahun berdirinya komunitas pembudidaya tanaman anggur di kota yang sudah tersohor dengan budidaya anggrek. Mereka ingin menunjukkan hasil budidaya tanaman yang berasal dari luar negeri itu kepada pemerintah kota dan Kementerian Pertanian.

Ratusan tanaman anggur tumbuh dalam polybag di salah satu rumah kaca balai penyuluhan pertanian. Sulurnya merambat pada tali-tali yang dipasang sehingga merimbun. Beberapa tangkai buah menyempil di antara daun. Buah berwarna hijau, hijau kekuningan, dan keunguan itu menarik perhatian orang-orang yang datang.

Buah-buah ini berusia kurang dari lima bulan atau belum cukup umur untuk panen. Sebagai gantinya, tertera tanda jenis varietas anggur

dan foto buahnya yang sudah matang pada setiap batang pohon.

"Lima bulan lalu, rumah kaca ini kosong. Kami isi dengan tanaman anggur di polybag. Sekali jalan supaya banyak orang tahu kalau anggur bisa tumbuh di lahan terbatas, juga menghasilkan buah yang cantik dan bernilai ekonomi," kata Bagus Setyawan, anggota Komunitas Anggur Tangsel yang mengelola rumah kaca.

Ada 62 varietas anggur yang tumbuh di dalam rumah kaca seluas 200 meter persegi itu. Warga bebas berkunjung untuk belajar tentang anggur dan budidaya serta memperoleh bibit secara gratis dalam jumlah terbatas atau membelinya.

Setiap hari ada saja yang datang. Biasanya pengunjung datang dalam kelompok atau rombongan yang terdiri dari 10 hingga seratusan orang. Mereka berasal dari sekolah-sekolah, komunitas, atau instansi tertentu.

Sukma Hadi, pengurus Masjid Attaqwa di Pamulang Estate, menjajal kerja sama budidaya anggur dengan komunitas anggur. Untuk tahap awal, akan ditanam 12 pohon dari berbagai varietas di instalasi berukuran 4 meter x 6

meter di pekarangan masjid seluas 100 meter persegi.

"Saya lihat anggur potensial, tidak perlu lahan skala luas. Ini mau coba dulu supaya warga lihat dan tertarik menanam di rumah masing-masing. Mudah-mudahan lancar," katanya.

Butuh dukungan

Komunitas Anggur Tangsel punya lebih dari 200 anggota aktif. Mereka menanam anggur di pekarangan rumah masing-masing. Dalam dua tahun terakhir sudah menghasilkan ribuan bibit yang dibagikan secara gratis dan dijual untuk kegiatan komunitas.

Roy Nurdin, Ketua Komunitas Anggur Tangsel, mengembangkan komunitas anggur dari sosial media. Ia menghubungi penyuka tanaman anggur satu per satu untuk membentuk komunitas.

"Dalam keterbatasan, kami kembangkan komunitas ini. Banyak angan dan mimpi yang membutuhkan dukungan pemerintah. Tanpa dukungan itu, rasanya tidak akan maksimal," katanya kepada Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dan

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto.

Komunitas anggur berharap bisa beraudiensi dengan Menteri Pertanian dalam waktu dekat. Audiensi itu untuk membahas budidaya, perizinan, dan pasar anggur di Tanah Air.

Benyamin mengapresiasi kehadiran pegiat hortikultura di kota seluas 147,19 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai 1,3 juta jiwa. Kota yang tidak terlampaui luas serta terbatasnya lahan basah untuk pertanian.

"Kota Tangerang Selatan dulunya basis petani karet. Akar petani ini tidak hilang dan berkembang jadi budidaya anggrek, lalu sekarang anggur dan macam-macam," ucapnya.

Peluang-peluang tersebut

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☒ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL	14 / 1 / 2022
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN	12 /
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI	☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya		☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan		☐ Opini/Artikel
☒ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post		☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika			☐ Pojok/Karikatur

wajib dimaksimalkan karena posisi yang strategis, yakni berada di antara Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang.

Benyamin menjanjikan dukungan kepada warga yang punya ide atau gagasan di bidang pertanian supaya tersohor seperti anggrek. Dinas terkait akan berkolaborasi mengembangkan hortikultura, termasuk lokasi dan kerja sama yang potensial dengan penggunaan teknologi.

"Kalau bisa sampai level rumah tangga bisa dimanfaatkan halamannya. Tanam cabai yang jadi penyumbang inflasi. Juga supaya tidak ada lahan hijau terbengkalai," katanya.

Pekerjaan rumah

Bukan saja dukungan semata. Ada pekerjaan rumah lain, yaitu pasar supaya budidaya anggur tak cuma pa-

nas-panas tahi ayam dan urusan perizinan di kementerian. "Komunitas anggur harus ada data produksi dalam setahun berapa. Nanti bisa dicarikan pasar yang berkelanjutan," ujarnya.

Jika tidak, pegiat kebangunan memasarkan panen. Kalau sudah ada pasar, nanti juga harus bisa menjamin pasokan secara rutin.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto sependapat. Pertanian kota tengah tumbuh pesat selama pandemi Covid-19. Contohnya, penjualan benih sayur dan buah di lokapasar melonjak lima kali lipat. "Banyak komunitas baru yang tumbuh signifikan selama di rumah saja. Penjualan tanaman hias, misalnya, izin ekspornya sampai naik tiga kali lipat," katanya.

Peluang-peluang tersebut harus ditangkap dengan memanfaatkan secara maksimal lahan sempit yang ada di Tangerang Selatan. Khusus tanaman anggur, salah satu tangannya ialah memenuhi selera pasar yang gemar rasa manis. Saat ini kebanyakan menghasilkan buah anggur yang asam sehingga lebih cocok dijadikan bahan baku minuman.

Prihasto memastikan jika Kementerian Pertanian akan memfasilitasi budidaya anggur asalkan pegiatnya punya lahan atau tempat yang jelas atau tidak bermasalah. Perlu juga membantu prosedur ad-

ministrasi pendaftaran varietas anggur agar bisa mendapatkan bantuan anggaran. Varietas wajib didaftarkan karena bibitnya dibeli dari sejumlah negara. Hal ini karena anggur bukan tanaman asli Indonesia.

"Pastikan juga bisnisnya. Jangan sampai baru sekali dua kali panen, lalu telantar," ujarnya.

Anggur punya potensi pasar yang besar. Namun, budidayanya masih terbatas. Butuh komitmen para pegiat dan pemerintah supaya salah satu buah eksotis ini bisa tersohor seperti anggrek.



KOMPAS/WISNU WARDHANA DHANY

Anggur hasil budidaya Komunitas Anggur Tangsel di rumah kaca Balai Penyuluhan Pertanian Jombang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (13/1/2022).

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 14/11/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Kementan Tekan Impor Daging Sapi

Pataka menyarankan pemerintah mengevaluasi kebijakan impor daging kerbau dari India.

■ DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Pemerintah akan mengimpor daging sapi dan kerbau sebanyak 266.065 ton pada tahun ini. Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan, volume impor daging sapi terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

"Impor memang iya masih dilakukan, tapi jumlahnya terus menurun," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun dalam webinar yang digelar Pataka, Kamis (13/1).

Makmun menjelaskan, pemerintah telah menetapkan neraca daging sapi dan kerbau nasional untuk 2022. Tingkat konsumsi diperkirakan sebesar 2,57 kilogram (kg) per kapita per tahun atau 706 ribu ton secara nasional. Sementara itu, kemampuan produksi dalam negeri diproyeksikan hanya 436 ribu ton dan stok awal tahun 62 ribu ton. Dengan demikian, pasokan yang ada masih di bawah dari kebutuhan.

Di sisi lain, pemerintah pun menargetkan harus terdapat stok sisa

akhir tahun sebesar 58,8 ribu ton. Dengan demikian, diperoleh defisit daging 2022 sebesar 266 ribu ton. Defisit tersebut akan dipenuhi melalui impor.

Melihat tren tahun-tahun sebelumnya, impor daging berasal dari impor sapi bakalan, daging sapi beku dari Australia dan Brasil, serta daging kerbau beku India.

Makmun mengatakan, alokasi impor daging tahun ini telah dihitung bersama dengan para kementerian terkait. Volume impor tersebut tercatat turun 3,4 persen dibandingkan impor pada 2021 yang sebesar 284,2 ribu ton. Impor pada 2021 juga menurun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. **13-7**

Sementara itu, dari sisi produksi terus mengalami peningkatan. Pada 2022, ditargetkan produksi dapat mencapai 274,8 ribu ton, naik 3,13 persen dibandingkan 2021 yang sebesar 272,2 ribu ton.

"Produksi sapi lokal kita terus tumbuh, tapi memang belum bisa mengejar kebutuhan konsumsi daging sapi yang sebetulnya partisipasinya

hanya tujuh persen dari konsumsi pangan hewani," kata Makmun.

Ia mengatakan, Kementan akan terus meningkatkan produksi daging sapi lokal dengan berbagai program. Salah satu yang masih diupayakan, yakni integrasi lahan perkebunan sawit untuk peternakan sapi.

Budi daya ternak sapi di lahan sawit juga akan menciptakan siklus kehidupan yang baik karena dapat mencegah efek rumah kaca. Keberadaan sapi dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia serta untuk membersihkan gulma dan rumput di area perkebunan.

Sementara itu, Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) menilai, kebijakan pemerintah membuka impor daging kerbau beku India sejak 2016 belum mampu memberikan dampak pada penurunan harga daging dalam negeri. Tren harga justru terus mengalami fluktuasi, bahkan cenderung meningkat.

Ketua Gapuspindo Didiek Purwanto mencatat, realisasi impor daging kerbau beku pada 2016 sebesar 39,5 ribu ton dan meningkat menjadi 73 ribu ton pada 2021.

"Kita lihat harga eceran daging sapi dari data BPS sejak 2019 sampai 2021 ternyata hampir berdampingan (sama) sehingga tidak telah berdampingan

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL	14/1/2022
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN	7/1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI	☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya		☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan		☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post		☐ Tajuk
☐ Kontan	☒ Republika			☐ Pojok/Karikatur

pak menurunkan harga daging," kata Didiek.

Ia mencatat, harga daging sapi pada 2019 berkisar Rp 105 ribu-Rp 109 ribu per kg. Kemudian, harga pada 2020 bergerak pada rentang Rp 110 ribu-Rp 112 ribu per kg. Sedangkan, pada 2021 harga masih di kisaran Rp 112 ribu per kg. Padahal, kata dia, impor daging kerbau beku India yang didatangkan pemerintah melalui BUMN dijual sebesar Rp 80 ribu per kg atau jauh di bawah harga pasar dalam negeri.

"Jadi, daging beku ini dijual berapa di pasar? Apa benar Rp 80 per per kilogram atau justru dia terangkat naik dan harga daging sapi lokal tertarik turun," ujarnya.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Ali Usman menyarankan pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan impor daging kerbau asal India. Menurut dia, perlu ada pengukuran efektivitas daging beku tersebut dalam membantu menurunkan harga daging sapi lokal.

Ia menuturkan, harga daging sapi masih tinggi dan daging kerbau mengalami kenaikan. "Tata niaga harus dibenahi jangan hanya melihat dari sisi konsumen, tetapi dari sisi produsen peternak rakyat juga harus dilihat," katanya. ■ ed: ahmad fikri noor

Impor dan Konsumsi Daging Cenderung Turun k. 10

Data Kementerian Pertanian menunjukkan impor daging sapi/kerbau terus turun, sejalan dengan peningkatan produksi lokal. Pada 2022, produksi dalam negeri diperkirakan 436.704 ton. Tahun lalu, produksi dalam negeri tercatat 423.443 ton. Konsumsi daging juga cenderung stagnan dan turun di masa pandemi, yakni 2,46 kilogram per kapita pada 2021, turun dari 2,53 kilogram per kapita pada 2020. (LKT)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 11/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Pemerintah Tetapkan Kuota Impor Daging Sapi 266 Ribu Ton

JAKARTA – Pemerintah menetapkan kuota impor daging sapi dan kerbau tahun ini sebesar 266.065 ton guna menutupi defisit pasokan daging sapi lokal. Pada 2022, total kebutuhan daging sapi nasional mencapai 706.388 ton, sementara produksi dalam negeri hanya 436.704 ton.



Makmun

Oleh Ridho Syukra

17/7

Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (PKH Kementan) Makmun menyatakan, setelah mengalami penurunan konsumsi daging per kapita menjadi 2,46 kilogram (kg) per tahun pada 2021 akibat turunya kegiatan dan aktivitas masyarakat karena pandemi Covid-19, pada 2022 konsumsi per kapita kembali meningkat menjadi 2,57 kg

per tahun seiring pulihnya ekonomi. Di sisi lain, jumlah penduduk tahun ini mencapai 274.859.100, sedangkan pada 2021 hanya 272.248.500. "Dengan mempertimbangkan itu, keluarlah angka 266.065 ton, ini sudah kami hitung bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan kementerian/lembaga terkait," kata Makmun.

Makmun mengatakan hal tersebut dalam diskusi daring bertema Banjir Kerbau India, Kemana Sapi Lokal Kita? yang digelar Pusat Kajian Pertanian Pangan & Advokasi (Pataka), Kamis (13/1). Berdasarkan Neraca Daging Sapi/Kerbau Nasional yang dilansir Kementan, pada 2022, total kebutuhan daging mencapai 706.388 ton, sementara produksi dalam negeri 436.704 ton dan stok awal tahun 2022 tercatat 62.485 ton. Dengan kondisi itu, defisit pasokan daging domestik mencapai 207.199 ton dan ditetapkan target stok (cadangan) akhir 2022 sebesar 58.866 ton, sehingga impor setara daging yang harus dilakukan 266.065 ton. Dalam neraca itu, belum ada pembagian besaran untuk impor daging/sapi hidup maupun daging kerbau beku.

Menurut Makmun, pemenuhan kebutuhan dari luar negeri (impor) terjadi bukan karena produksi lokal yang menurun, sebab produksi daging sapi lokal justru terus menunjukkan peningkatan. Produksi daging sapi lokal pada 2020 meningkat 0,1% dari 2019, produksi pada 2021 naik 4,56% dari 2020, dan tahun ini tumbuh 3,13% dari 2021. Impor juga terus menunjukkan tren penurunan, pada 2020 turun 0,91% dari 2019, pada 2021 turun 10,82% dari 2020, dan tahun ini diproyeksikan turun 3,4% dari 2021. Pada 2021 misalnya, total kebutuhan daging sapi nasional 669.731 ton, produksi lokal 423.443 ton, dan realisasi impor 284.277 ton. "Jadi, produksi dalam negeri bertumbuh. Di sisi lain, impor masih, iya, tapi jumlahnya terus menurun," kata dia.

Terkait realisasi impor, jelas Makmun, pada 2021, pemasukan (impor) daging kerbau dari India mencapai 79.996 ton dari rekomendasi 80 ribu ton, sedangkan realisasi impor dag-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 14/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

“

Konsumsi daging per kapita pada 2021 susut menjadi 2,46 kilogram (kg) per tahun akibat turunnya kegiatan dan aktivitas masyarakat. Pada 2022, konsumsi per kapita akan naik lagi menjadi 2,57 kg per tahun.

ing sapi dari Brasil adalah 15.890 ton dari rekomendasi sebesar 20 ribu ton. “Untuk impor daging kerbau itu diang-gap terealisasi 100%,” ujar Makmun. Impor daging sapi pada 2021 sebesar 284.277 ton yang terdiri atas sapi bakalan 383.655 ekor (73.545 ton), daging sapi 114.846 ton (Australia), daging kerbau India 79.996 ton, dan daging sapi Brasil 15.890 ton.

Belum Turunkan Harga

Sementara itu, Ketua Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) Didiek Purwanto mengatakan, dalam prognosa kebutuhan daging sapi 2017-2021 selalu ada gap sehingga peningkatan populasi setiap tahun

ternyata tidak menurunkan gap konsumsi nasional dengan produksi. Padahal, menurut data pemerint-tah, populasi sapi terus meningkat, pada 2021 mencapai 18,05 juta ekor. Melalui BUMN pangan, importasi daging kerbau beku India 2016-2021 sebanyak 39.524 ton dengan harapan harga daging sapi di dalam negeri Rp 80 ribu per kg. Nyatanya, harga daging sapi lokal Rp 109 ribu per kg pada 2019-2021. “Artinya, program impor daging kerbau India ini belum berhasil menurunkan harga daging sapi lokal,” ujar dia.

Didiek juga menyarankan agar pemerintah lebih baik mengimpor sapi bakalan ketimbang impor daging beku guna memenuhi kebutuhan daging nasional. Hal itu karena pemasukan sapi bakalan lebih menguntungkan dan memberi dampak ganda bagi perekonomian nasional. “Impor sapi bakalan bisa menggerakkan ekonomi di usaha penggemukan sapi, sementara impor daging beku hanya akan dijual langsung kepada konsumen,” jelas dia.

Direktur Pataka Ali Usman menga-takan, kebijakan impor daging kerbau India harus dievaluasi sejauh mana kemampuannya dalam menurunkan harga daging sapi lokal. Faktanya, harga daging sapi masih tinggi. Tata niaganya juga harus dibenahi, jangan hanya dilihat dari sisi konsumen tetapi juga dari sisi produsen. Sistem informasi pangan dalam satu data terkait *supply-demand* daging sapi juga harus dibangun, tidak hanya soal data produksi tetapi juga angka konsumsi di berbagai daerah. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui jumlah peternak dan ternak di setiap daerah, juga data biaya produksi dari pemeli-haraan ternak itu sendiri.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 14/1/2023 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 14 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☒ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

Daging Sapi Impor Kembali Geruduk Pasar Lokal

Pemerintah akan membuka keran impor daging sapi sebanyak 266.065 ton pada tahun ini

Abdul Basith Bardan

JAKARTA. Pemerintah telah menetapkan kebutuhan daging sapi nasional untuk tahun 2022. Hasilnya, Indonesia akan mengimpor daging sapi untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri di tahun ini.

Berdasarkan hitungan pemerintah, total kebutuhan daging sapi untuk tahun 2022 sebanyak 706.388 ton. Total kebutuhan itu sudah termasuk target stok akhir tahun yang sebanyak 58.866 ton.

Adapun jumlah produksi daging sapi domestik tahun 2022 ini pemerintah targetkan bisa mencapai 436.704 ton. Jumlah tersebut sudah termasuk stok awal tahun yang sebanyak 62.485 ton.

Walhasil, berdasarkan neraca perkiraan produksi dan kebutuhan saat ini, terjadi kekurangan pasokan daging sapi ke pasar nasional. Pemerintah

pun menetapkan jumlah impor daging sapi tahun 2022 ini sebanyak 266.065 ton.

Makum, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Kamis (13/1) menjelaskan jumlah itu merupakan perhitungan bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan instansi lainnya.

Meski masih impor, Makum sebut jumlah sapi yang diimpor Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sebab, Indonesia, sebutnya, sudah bisa meningkatkan produksi sapi di dalam negeri. Meskipun konsumsi daging per kapita di dalam negeri juga terus melonjak.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian 2021 produksi daging sebanyak 423.443 ton. Sementara itu kebutuhan daging sebanyak 669.731 ton.

Sehingga impor daging pada tahun 2021 lalu sebanyak 284.277 ton. Angka tersebut terdiri dari impor sapi bakalan sebanyak 383.665 ekor, daging kerbau india 79.996 ton, da-

Peternak harap Pemerintah kedepankan impor sapi bakalan.

ging sapi 114.846 ton, dan daging sapi brazil 15.890 ton.

Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) menyoroti upaya pemerintah mengisi kekurangan daging dengan impor daging beku.

Ketua Gapuspindo Didiek Purwanto mencatat total populasi sapi di Indonesia tahun

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 14/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☒ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

2021 sebanyak 18,05 juta ekor. Naik dari tahun lalu yang sebanyak 17,44 juta ekor. Tapi jumlah sapi layak potong hanya 2,05 juta ekor atau setara 366.942 ton daging sapi.

Sedangkan untuk tahun ini, kekurangan pasokan daging sapi bakal ditutupi dengan impor. Perinciannya impor sapi bakal 625.000 ekor dan impor dalam bentuk daging sapi sebesar 170.652 ton.

Ia pun berharap, pemenuhan daging sapi lebih diarahkan pada impor sapi bakalan saja ketimbang daging beku. Se-

bab kegiatan peternakan sapi akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena terkait dengan 120 industri lainnya. "Impor sapi bakalan lebih punya nilai tambah," katanya.

Muhammad Hasyim, Direktur Operasional PT Berdikari (Persero) mengaku belum mendapatkan penugasan impor daging untuk kebutuhan tahun 2022. Adapun tahun lalu Berdikari mendapat penugasan impor daging sapi Brazil 20.000 ton. "Kalau sudah ada penugasan, kami pun sudah siap," tuturnya.

Kebutuhan Daging Sapi Nasional

Tahun	Konsumsi per Kapita (kg/tahun)	Kebutuhan Nasional (ton)	Produksi Domestik (ton)	Impor Setara Daging (ton)
2022*	2,56	706.388	436.704	266.065
2021	2,53	669.731	423.443	284.277
2020	2,46	681.180	404.997	324.019
2019	2,57	683.294	404.590	339.891

*Angka sementara

Sumber: Kementerian Pertanian

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 14/1/2022 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

KONSUMSI DOMESTIK

KUOTA IMPOR DAGING MENYUSUT

Ilim Fathimah Timorria
ilim.fathimah@bisnis.com

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah memperkirakan kebutuhan impor daging sapi dan kerbau sepanjang 2022 mencapai 266.065 ton atau turun 3,4%, di tengah kenaikan konsumsi daging per kapita.

Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Makmun mengatakan volume impor daging terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Dia mencatat volume impor 2020 turun 0,91% daripada 2019. Penurunan volume impor daging sapi berlanjut pada 2021 yang mencapai 10,82% dibandingkan dengan realisasi 2020.

"Impor memang iya masih dilakukan, tetapi jumlahnya terus menurun," katanya dalam diskusi daring Pataka, Kamis (13/1).

Menurutnya, kebutuhan impor daging yang berlanjut bukan disebabkan oleh penurunan produksi di dalam negeri. **B1.5**

Namun, Makmun menegaskan konsumsi agregat Indonesia dari tahun ke tahun cenderung tumbuh meski konsumsi per kapita stagnan dalam 5 tahun terakhir.

Dalam neraca pasokan dan kebutuhan daging sapi pada 2022 yang disusun pemerintah, konsumsi

daging sapi per kapita pada tahun ini mencapai 2,57 per kg per tahun, meningkat dari konsumsi 2021 di angka 2,46 per kg per tahun.

Adapun, jumlah penduduk bertambah dari 272,24 juta pada 2021 menjadi 274,85 juta pada 2022 sehingga kebutuhan daging meningkat dari 669.731 ton menjadi 706.388 ton.

Produksi daging nasional pada 2022 ditaksir 436.704 ton, naik 3,13% daripada 2021 yang mencapai 423.443 ton.

Dengan stok awal tahun yang berjumlah 62.485 ton, dia memprediksi Indonesia masih defisit 207.199 ton. Pemerintah juga menetapkan stok cadangan sebesar 58.886 ton, sehingga

kebutuhan impor menyentuh 266.065 ton.

"Produksi sapi lokal kita terus tumbuh, meski memang belum bisa mengejar kebutuhan konsumsi daging sapi yang sebetulnya partisipasinya hanya 7% dari konsumsi pangan hewani," kata Makmun.

Dia berjanji Kementan berupaya meningkatkan produksi daging sapi lokal dengan berbagai program. Salah satu strategi yang digarap adalah integrasi peternakan sapi dengan perkebunan sawit.

Makmun mengatakan lahan perkebunan sawit memiliki potensi karena tidak berisiko dialihfungsikan. Upaya lain yang ditempuh, lanjutnya, dengan pengembangan sapi atau kerbau unggul, impor indukan sapi, peningkatan kesehatan hewan, dan penegakan pelarangan pemotongan sapi betina produktif.

Kementan mencatat populasi total sapi potong meningkat dari 16,43 juta ekor pada 2017 menjadi 18,05 juta ekor pada 2021.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 14/1/2022 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tari | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Potok/Karikatur |

Potong (Gapuspindo) Didiek Purwanto meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan impor daging kerbau beku India atau *Indian buffalo meat* (IBM).

Dia menilai impor daging beku asal India tidak efektif dalam menciptakan stabilitas harga di pasar.

Padahal, kebijakan impor daging beku asal India digalakkan untuk menekan harga di pasaran menjadi Rp80.000 per kg.

Didiek menyatakan harga daging kerbau atau sapi di pasaran justru stabil di atas Rp100.000 per kg dalam 3 tahun terakhir.

"Kalau melihat realisasi impor dan harga eceran di lapangan, BPS mendata dari 2019 sampai 2021 ternyata rata-rata masih di atas Rp105.000 per kilogram," kata Didiek.

Rata-rata harga terendah pada 2019 tercatat berada di kisaran Rp107.000 per kg ketika impor daging kerbau mencapai 93.970 ton menurut data Direktorat

Perkembangan Impor Daging Kerbau (ton)



Sumber: Ditjen Bea Cukai Kementerian & Kementerian, diolah

Neraca Daging Sapi dan Kerbau (ton)

	2020	2021	2022*
Kebutuhan	681.180	669.731	704.348
Produksi Dalam Negeri	404.997	423.443	436.704
Neraca	(276.183)	(246.288)	(267.199)
Stok Cadangan			58.866
Impor Setara Daging **	324.019	284.277	268.065

*J Prognosis 2022; **J Termasuk impor sapi bakalan yang telah dipotong

ANTISIPASI KETIDAKPASTIAN

Salah satu problem ketersediaan daging sapi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian stok. Padahal, konsumsi daging per kapita cenderung naik dari tahun ke tahun. Pilihan untuk mengatasi problem itu adalah dengan mengimpor daging sapi atau kerbau.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☒ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 14/1/2022 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Jenderal Bea Cukai.

Adapun, harga rata-rata pada 2020 dan 2021 berkisar di level Rp110.000 per kg hingga Rp115.000 per kg ketika realisasi impor sebesar 76.365 ton dan 73.780 ton per November 2021.

"Jadi daging beku ini dijual berapa di pasar? Apa benar bisa mencapai Rp80.000 per kilogram atau justru dia terangkat naik," katanya.

Didiek lantas mengusulkan kebijakan impor IBM dikembalikan pada tujuan semula, yakni hanya dilakukan dalam keadaan tertentu dan untuk stabilisasi harga ketika terjadi gejolak.

Dia memandang kebijakan untuk mendorong harga ke level Rp80.000 per kg kurang tepat. Artinya, harga dari pemasok harus berada di bawah Rp40.000 per kg, sementara harga daging impor cenderung menunjukkan tren kenaikan.

"Kalau memang pasokan cukup dan harga stabil, tidak perlu impor. Kita lihat dalam 3 tahun

terakhir harga stabil tidak bergerak [ke Rp80.000 per kg]. Ini menunjukkan tidak ada pengaruhnya," lanjutnya.

Dia juga menyatakan bahwa impor daging beku dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) seperti India bertentangan dengan undang-undang (UU) peternakan.

Sesuai UU peternakan, Indonesia hanya bisa melakukan impor produk hewan dari negara atau zona bebas PMK. "Jika memang ada penugasan, kami harap ada pengawasan yang ketat karena peredaran daging segar," katanya.

SAPI AUSTRALIA

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Indonesia Juan Permata Adoe mengatakan program *economic powerhouse* untuk daging sapi dalam kemitraan Indonesia Australia-Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) belum berjalan optimal.

Kesepakatan dagang yang belakangan dituangkan dalam pro-

gram Red and Cattle Partnership itu belum menghasilkan komitmen investasi antar-pelaku usaha Indonesia-Australia untuk pengembangan rantai nilai pangan di tingkat Asia Tenggara.

Dia menilai pakta dagang itu belum bersifat komprehensif untuk dapat mengikat investasi pengembangan rantai nilai pangan antara Indonesia dan Australia.

"Belum bisa jalan karena persepsi di dalam program IA-CEPA ini tidak komprehensif, pelaku usaha Australia belum siap karena *mind-set* mereka selama ini ekspor. Sekarang mereka tidak bisa ekspor ke Indonesia karena harga terlalu mahal," kata Adoe. ■

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 14/11/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Pemerintah Disarankan Buat DMO Minyak Sawit

■ DEDY DARMAWAN NASUTION, BAYU ADJI P

JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengharapkan, pemerintah mengatur tata niaga minyak sawit yang dikhususkan untuk dalam negeri. Langkah itu dinilai perlu agar pengaruh harga internasional tidak berdampak besar kepada situasi domestik sehingga lonjakan harga yang terjadi seperti sekarang dapat dihindari.

"Pemerintah harus fokus mengupayakan langkah seperti kebijakan *domestic market obligation* (DMO) untuk pemenuhan CPO (*crude palm oil*) di pasar nasional. Harus ada semacam peraturan, yang menyatakan kebutuhan dalam negeri harus terpenuhi terlebih dahulu," Sekretaris Pengurus YLKI, Agus Suyatno, Kamis (13/1). 12-5

Menurut Agus, kebijakan itu dapat memberikan kepastian bagi perusahaan produsen minyak goreng, yang tidak terintegrasi langsung dengan perkebunan sawit untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. YLKI menduga, tata niaga minyak goreng di Indonesia dikuasai oleh segelintir perusahaan pengekspor besar, yang terintegrasi langsung dengan kebun sawit. Mereka yang memiliki hak guna usaha (HGU) lahan perkebunan, seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, selebihnya baru boleh diekspor.

Selain itu, pihaknya menduga, ada permainan kartel oleh segelintir perusahaan besar yang mengatur harga minyak sawit untuk ekspor, juga diberlakukan untuk pasar dalam negeri. Menurut Agus, hal itu tidak adil bagi pasar Indonesia. "Kita punya bahan baku, tapi dijual sama dengan harga di internasional. Ini tidak diatur oleh pemerintah," ujar dia.

Agus menilai, upaya stabilisasi harga melalui

operasi pasar minyak goreng bersubsidi seharga Rp 14 ribu per kilogram (kg), tidak dapat bertahan lama pada saat ketidakpastian harga minyak sawit yang belum jelas kapan akan turun. Operasi pasar memang bagus untuk jangka pendek dalam menurunkan harga secara cepat. Namun, menurut Agus, harga dapat kembali melonjak dalam waktu singkat.

Operasi pasar terus dilakukan di berbagai daerah untuk menstabilkan harga minyak goreng yang masih tinggi. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Firmansyah mengatakan, harga minyak goreng curah di Kota Tasikmalaya saat ini sudah di atas Rp 20 ribu per kilogramnya. Padahal, dalam kondisi normal, harga minyak goreng curah hanya Rp 12.500 per kilogram.

Firmansyah menilai, stok minyak goreng itu sebenarnya banyak di distributor ataupun pemasok. Namun, ia tak tahu secara pasti penyebab harga minyak menjadi naik. "Kalau barangnya tidak ada, itu mungkin naik. Ini barangnya ada, tapi *kok* jadi mahal," kata dia.

Ia berasumsi, kenaikan ini disebabkan oleh adanya pihak yang menahan bahan baku untuk minyak goreng. Akibatnya, produksi minyak goreng ini menjadi mahal. "Kemungkinan ada yang memainkan. Tapi itu harus betul-betul dikaji dan melalui pemantauan," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meninjau kegiatan operasi pasar di Pasar Wonokromo, Surabaya, Kamis (13/1). Pemerintah, menurut dia, akan terus melakukan kegiatan serupa. Utamanya, untuk terus mendistribusikan minyak goreng subsidi yang dibanderol dengan harga Rp 14 ribu per liter. "Mudah-mudahan pekan depan, sudah lebih banyak lagi minyak dengan harga Rp 14 ribu per liter," ujar dia. ■ *dadang kurnia ed. mas alamil huda*

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 4/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

PTPN VIII Komit Jaga Lahan Konservasi di Kebun Sawit

JAKARTA – PT Perkebunan Nasional VIII (PTPN VIII) 10-7 berkomitmen untuk menjaga lahan konservasi di perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dengan ditanami pohon langka bernama gutha perca. "Lahan tanaman gutha tetap dipertahankan sebagai lahan konservasi, di samping kita ambil daunnya untuk diproduksi," kata Asisten Kepala Wakil Manajer PTPN VIII Unit Sukamaju Dadan Ramdan, kemarin.

Tanaman gutha perca tumbuh di 333 hektare (ha) lahan yang tersebar di delapan area perkebunan kelapa sawit PTPN VIII di Kabupaten Sukabumi. Pohon gutha perca sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yang pada saat itu pemerintahan Belanda di Nusantara memproduksi getah gutha perca dan dikirim ke berbagai negara di Eropa untuk memproduksi berbagai perlengkapan. "Sejak alih budidaya dari karet ke sawit mulai 2002, tanaman gutha tetap dipertahankan. Kalau untuk lahan konservasi tidak berubah," kata Dadan. Bahkan, PTPN VIII melakukan budidaya lagi tanaman yang hampir punah itu meski tanpa tambahan lahan konservasi.

Pemerintah mensyaratkan setiap perkebunan kelapa sawit di Indonesia mendapatkan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut yaitu dampak lingkungan yang harus dijaga dengan melindungi area-area bernilai konservasi tinggi. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), setiap anggotanya diwajibkan mengimplementasikan prinsip ISPO, yaitu menjaga dampak lingkungan dengan melakukan rehabilitasi sungai, menjaga cadangan hutan di dalam kawasan perkebunan sebagai sumber penyerap karbon, serta program restorasi hutan bakau. (d/ant)

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 14/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 9 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto | |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel | |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk | |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur | |

Distribusi Bakal Diatur Ketat

Penyediaan dan distribusi minyak goreng bersubsidi diatur ketat dalam peraturan menteri perdagangan yang terbit pekan ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan

Jumlah Pabrik Minyak Goreng Sawit Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perdagangan mengatur ketat mekanisme penyediaan dan pendistribusian minyak goreng kemasan sederhana bersubsidi yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pengaturan itu untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana dan penjualan minyak goreng di atas harga eceran tertinggi.

Mekanisme penyediaan minyak goreng bersubsidi itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Selain mengatur harga eceran tertinggi (HET), regulasi yang ditandatangani pada 11 Januari 2022 itu mengatur pula syarat dan sanksi distributor dan pengecer yang akan terlibat serta pembentukan tim pengawas. Dalam regulasi itu, HET minyak goreng kemasan sederhana bersubsidi ditetapkan Rp 14.000 per liter.

Penyediaan minyak goreng bersubsidi ini akan berlangsung selama enam bulan dan ditujukan bagi masyarakat, termasuk usaha mikro dan kecil.



Para pelaku usaha, dalam hal ini produsen, pengemas, dan distributor, yang akan terlibat dalam penyediaan dan penyaluran wajib mendaftar ke Kementerian Perdagangan. Setelah diverifikasi dan ditetapkan, mereka wajib membuat perjanjian pembiayaan penyediaan dengan BPDPKS.

Mereka juga dapat menggunakan merek minyak goreng kemasan sendiri. Adapun yang tidak memiliki merek dagang sendiri bisa menggunakan merek Minyakita yang dimiliki Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.

Poin-poin dalam Permendag No 1/2022

- Penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk jangka waktu enam bulan dan dapat diperpanjang
- Pelaku usaha wajib mendistribusikan minyak goreng kemasan sederhana untuk kebutuhan masyarakat dan UMKM
- Pelaku usaha dapat menggunakan merek Minyakita

Provinsi yang tidak memiliki pabrik

Aceh	Nusa Tenggara Barat	Sulawesi
Bali	Nusa Tenggara Timur	Sulawesi Barat
Jambi	Kalimantan Utara	Nusa Tenggara
Bengkulu	Sulawesi Utara	Maluku Utara
Kep. Bangka Belitung	Sulawesi Tengah	Papua Barat
DI Yogyakarta	Sulawesi Selatan	Papua
Bali	Sulawesi Tenggara	

"Pelaku usaha yang menggunakan merek dagang Minyakita dikecualikan dari syarat standarisasi produk. Namun, mereka harus mendapatkan minyak goreng itu dari produsen yang minyak gorengnya sudah terstandarisasi," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Peraturan menteri perdagangan itu juga mengatur pelibatan jaringan distribusi dan pengecer. Untuk mendapatkan pembayaran dari BPDPKS, mereka wajib melampirkan laporan

rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap jaringan distribusi yang berisikan nama, jaringan distribusi, volume, harga dari yang diserahkan, dan faktur pajak.

Menurut Oke, selama proses penyediaan minyak goreng bersubsidi, pelaku usaha yang terlibat akan dipantau tim pengawas. Jika melanggar regulasi, pelaku usaha, termasuk pengecer, akan dikenai sanksi berupa penghentian sementara penyaluran minyak goreng bersubsidi hingga dicabut izin usahanya.

"Regulasi ini, antara lain, untuk mengantisipasi terjadi penyalahgunaan dana dan pen-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 14 / 1 / 2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

jualan minyak goreng bersubsidi di atas HET. Salah satu mekanisme pengawasan yang akan dilakukan adalah memasang label harga pada kemasan mulai Februari 2022," ujarnya.

Sebelumnya, untuk menstabilkan harga minyak goreng, pemerintah akan menggelontorkan minyak goreng kemasan sederhana bersubsidi sebanyak 1,2 miliar liter selama enam bulan ke depan. Jika masih dibutuhkan, pemerintah akan menambahkannya menjadi 2 miliar liter hingga akhir tahun ini.

Pendistribusian minyak goreng seharga Rp 14.000 per liter itu menyasar pasar tradisional atau pasar rakyat yang selama ini dipantau Kemendag. Selisih harga pasar atau harga keekonomian di tingkat provinsi dengan HET akan disubsidi menggunakan dana BPDPKS.

Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, per 12 Januari 2022, rata-rata nasional harga minyak goreng curah dan kemasan sederhana masing-masing Rp 17.900 per liter dan Rp 19.100 per liter. Disparitas harga minyak goreng di berbagai daerah juga masih tinggi.

Untuk minyak goreng kemasan sederhana di Aceh, harganya sudah tembus Rp 24.500 per liter dan di Papua Barat Rp 22.000 per liter. Adapun harga terendah berada di Kalimantan Tengah Rp 17.000 per liter dan Jawa Timur Rp 17.250 per liter.

Minyak goreng BUMN

Sementara itu, ID Food atau Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan bekerja sama dengan Holding PT Perkebunan Nusantara III (PTPN) juga akan menggelontorkan minyak goreng seharga Rp 14.000 per liter. Kedua perusahaan induk tersebut tengah menyiapkan 750.000 liter minyak goreng kemasan sederhana.

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan juga ID Food, Arief Prasetyo Adi, mengatakan, minyak goreng kemasan sederhana yang akan dijual dengan harga terjangkau itu bukan minyak goreng bersubsidi. Minyak goreng itu diproduksi PTPN III.

ID Food akan mendistribusikan minyak goreng produksi BUMN ini ke lokasi-lokasi yang membutuhkan atau melalui jaringan toko dan warung pangan yang dikelola ID Food. "Kami juga akan menjualnya secara daring agar daya jangkau bisa lebih luas," ujar Adi.

Dalam upaya stabilisasi harga bahan pangan, penggelontoran minyak goreng bersubsidi serta operasi pasar juga digelar di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya, di Cirebon, Jawa Barat, Pemerintah Kota Cirebon bakal menggelar operasi pasar murah pada Selasa-Kamis pekan depan.

Kepala Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan, 25.000 liter minyak goreng disiapkan Kementerian Perdagangan untuk operasi pasar di Cirebon.

(HEN/JKI)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 14/1/2022 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

| PERSOALAN HARGA PUPUK |

Izin Distributor Bisa Dicabut

Bisnis, MATARAM — Harga pupuk PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah melewati ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Harga yang harus dibayarkan oleh petani untuk satu karung pupuk dengan berat 50 kg adalah Rp250.000 atau melampaui ketentuan HET yakni Rp125.000 per 50 kg. Harga tersebut juga naik drastis saat musim tanam sedang berlangsung dari akhir Desember 2021—Januari 2022.

AVP Sales Pusri NTB Eman Sulaeman mengatakan persoalan bakal mencabut izin distributor pupuk subsidi dan kios yang terbukti menjual pupuk subsidi di atas ketentuan HET.

"Harga pupuk yang melewati ketentuan harus dibuk-

tikan, jika terbukti harganya melampaui ketentuan HET, kami tidak segan akan mencabut izin distributor dan kios atau pengecer pupuk subsidi," jelas Eman kepada media, Rabu (12/1). **81.7**

Dia meminta petani yang menjadi korban atas tingginya harga jual pupuk di tingkat pengecer melapor ke Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) agar ditindaklanjuti. "Kami minta masyarakat atau petani aktif melapor jika menemukan pupuk dengan harga yang melewati ketentuan," ujarnya.

Data dari Pusri NTB menyebutkan ketersediaan pupuk sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan petani di saat musim tanam.

Ketersediaan pupuk subsidi pada 2022 mencapai 186.922 ton yang dialokasikan dari Kementerian Pertanian, se-

dangkan pada 2021 pupuk subsidi yang tersedia 188.587 ton.

"Jadi tidak ada alasan adanya kenaikan harga di tingkat distributor maupun pengecer, karena pupuk yang tersedia sangat berlimpah. NTB selalu diberikan penambahan jatah, pada Januari saja jatahnya 39.000 ton dari 34.000 ton kebutuhan pupuk subsidi. Dan jatah pupuk subsidi itu sudah tersedia di distributor dan pengecer," kata Eman.

Dia juga meminta peran KP3 selaku pengawas distribusi pupuk aktif turun ke lapangan untuk membuktikan adanya kenaikan harga yang tidak wajar. "Jika ditemukan adanya kenaikan harga yang melewati HET bisa ditembuskan kepada kami dan akan kami tindak dengan sanksi pencabutan izin," ungkapnya. **(K48)**

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 14/11/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☒ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Harapan Cak Imin Naikin Subsidi Pupuk 2x Lipat



Muhaimin Iskandar

WAKIL Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar menyebut, petani merupakan ujung tombak masa depan pangan Indonesia. Ironisnya, para petani saat ini menjerit akibat melonjaknya harga pupuk nonsubsidi mencapai 100 persen.

"Pemerintah harus bergerak cepat mengatasi persoalan ini. Caranya, naikkan subsidi hingga dua kali lipat, serta menata distribusi pupuk yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita," ujar Gus Muhaimin-sapaan Abdul Muhaimin Iskandar, melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memproyeksikan harga pupuk nonsubsidi bakal mengalami kenaikan sepanjang tahun 2022. Hal ini akibat melonjaknya harga bahan baku di tingkat global. Kenaikan

harga pupuk pun ikut andil mempengaruhi inflasi pada komoditas pangan awal tahun ini. **M.7**

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Dalam Negeri (Kemendag) Isy Karim mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan produsen lokal untuk menjaga harga pupuk nonsubsidi tetap stabil di tengah gejolak harga dunia.

Dia menargetkan, produsen dalam negeri dapat memberikan harga di bawah harga internasional untuk menjaga akses pupuk bagi petani.

Kenaikan harga pupuk nonsubsidi disebabkan oleh melonjaknya harga berbagai komoditas dunia seperti amonia, phosphate rock, KCL, gas dan minyak bumi.

"Ini disebabkan oleh pandemi, krisis energi di Eropa serta adanya kebijakan beberapa negara yang menghentikan ekspornya," kata Isy Karim, Minggu (9/1).

Melanjutkan keterangannya, Gus Muhaimin mengatakan, sampai hari ini distribusi pupuk belum mencapai 50 persen dari kebutuhan subsidi yang harusnya diproduksi. Karenanya, DPR akan memanggil kementerian terkait untuk menelusuri musabab persoalan tersebut.

"Mau tidak mau, DPR akan melakukan penelusuran melalui berbagai kementerian. Dengan begitu, ada langkah-

langkah anggaran yang tidak abai terhadap tuntutan yang sudah lama membuat menderita para petani kita," jelasnya.

Sementara, kelangkaan pupuk nampaknya sudah lama tidak ditangani dengan sungguh-sungguh.

Padahal, banyak petani menyampaikan aspirasi terkait persoalan itu kepada Presiden Jokowi, di antaranya saat kunjungan di Indramayu.

"Kondisi ini menjadi pertanda, harus adanya *emergency action* dari Pemerintah. Persoalan ini memerlukan penanganan sistematis, agar keluhan para petani tidak berkepanjangan," cetus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Dia juga mendorong berbagai kementerian, seperti Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan beraordinasi dan merumuskan sejumlah langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Ironi ini harus dihentikan, karena (kelangkaan pupuk) terjadi 10 tahun atau 15 tahun terakhir ini," tandasnya. ■ **ONI**

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 14/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

BUMN Pastikan Stok Pupuk Subsidi Aman

JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (PI Persero) memastikan stok pupuk subsidi tahun ini telah tersedia di gudang-gudang di berbagai daerah. BUMN itu juga terus mengoptimalkan pengawasan agar pupuk bersubsidi dapat didistribusikan kepada petani yang berhak sesuai alokasi dan berjalan baik. Stok pupuk bersubsidi pada awal 2022 mencapai 1,13 juta ton, yakni pupuk urea 512 ribu ton, NPK 305 ribu ton, SP36 103 ribu ton, ZA 135 ribu ton, dan organik 80 ribu ton.

Direktur Pemasaran PI Gusrizal menyatakan, stok pupuk subsidi bisa mencukupi kebutuhan hingga satu bulan ke depan. "Kami saat ini tengah gencar meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, agar stok pupuk subsidi di gudang-gudang kami dapat segera tersalurkan sesuai alokasi pemerintah," kata Gusrizal seperti dilansir *Antara*, kemarin. Untuk memastikan kesiapan stok tersebut, Gusrizal melakukan pengecekan langsung ke gudang penyangga di Klaten, Jawa Tengah, pada Selasa (11/1). Sebelumnya, Gusrizal juga telah mengecek kesiapan stok di gudang Sragen dan Karanganyar. "Selain memastikan kesiapan stok, kami juga terus memperkuat pengawasan dalam pendistribusiannya," ujar Gusrizal.

Bentuk pengawasan PI adalah sesuai prinsip 6 tepat, yaitu tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, dan tepat harga. Berdasarkan Permentan No 41 Tahun 2021, alokasi pupuk subsidi nasional tahun ini ditetapkan 9,11 juta ton dan 1,8 juta liter pupuk organik cair. Sebagai produsen, PI wajib menyalurkan pupuk subsidi sesuai jumlah dalam peraturan itu. Pengawasan dari PI juga didukung digitalisasi sistem distribusi pupuk subsidi, seperti Distribution Planning & Control System (DPCS). (tl) 10.7

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Itbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 14 / 12 / 22 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

📍 KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR

Harga Minyak Goreng Terus Naik

SETELAH liburan Tahun Baru usai, harga sejumlah kebutuhan pokok mulai menurun, tapi tidak dengan minyak goreng.

Bahkan, dibanding pada masa liburan, harga minyak goreng di sejumlah daerah justru naik. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, harga minyak goreng curah kembali naik dari Rp40 ribu per dua liter menjadi Rp41 ribu.

"Naik terus. Harga minyak goreng kemasan juga naik dari Rp41 ribu menjadi Rp42 ribu per liter. Kemasan satu liter mencapai Rp22 ribu," kata Diana, pedagang di Pasar Tradisional Kasih, Kota Kupang, kemarin. **MI.5**

Soal penyebab kenaikan, Diana tidak mau menebak-nebak. "Saya tahunya dari distributor naik sehingga kami pun terpaksa menaikkan harga jualnya."

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Harga minyak goreng kemasan naik dari Rp20 ribu menjadi Rp22 ribu per liter. Sementara itu, minyak goreng curah di angka Rp19 ribu-Rp20 ribu per liter.

"Kami masih menunggu kabar soal operasi pasar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sampai saat ini belum ada operasi pasar minyak goreng untuk membantu warga," kata

Kabid Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya, Enung Nurteti.

Operasi pasar

Operasi pasar minyak goreng memang hanya membantu beban warga untuk sementara, tidak menurunkan harga di pasar. Hal itu dibuktikan di Sumatra Selatan.

Pemerintah provinsi sudah memulai operasi pasar minyak goreng di 18 pasar, Rabu (12/1). Mereka menggelontorkan 52 ribu liter minyak goreng yang dijual dengan harga Rp14 ribu per liter.

Namun, operasi pasar tidak berdampak pada harga minyak goreng di pasar tradisional. Di Pasar Alang-Alang Lebar, Palembang, misalnya, para pedagang masih menjual minyak goreng kemasan dengan harga Rp19 ribu per liter.

"OP minyak goreng tidak berdampak pada harga. Yang kami rasakan hanya jumlah pembeli yang berkurang pada hari ini," kata Emmanuel, 26, pedagang.

Operasi pasar masih jadi pilihan bagi sejumlah daerah. Di Kota Sukabumi, Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelarkannya di 4 lokasi.

"Kami bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat.

Bantuannya berasal dari pemerintah pusat," kata Kepala Bidang Perdagangan, Widya Yudha.

Kota Sukabumi mendapatkan jatah sebanyak 7.200 liter minyak goreng kemasan botol. Harga jualnya sama seperti di banyak wilayah lain Rp14 ribu per liter.

Di Bali, operasi pasar dimotori Bulog. Mereka merangkul polda dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Selain minyak goreng, operasi pasar juga menjual kebutuhan lain, yakni beras dan gula.

"Kami berharap operasi pasar minyak goreng bisa menstabilkan harga di pasar," ujar Manajer Bisnis Bulog Bali, Muhammad Husin.

Gula, lanjutnya, juga jadi sasaran operasi pasar karena harga naik akibat masa panen berhenti dan pabrik setop operasi.

"Untuk minyak goreng, kami menggelontorkan 500 liter dan gula pasir 500 kilogram," tambah Husin. (PO/AD/DW/BB/BK/RS/OL/N-2)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 14/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 13/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☒ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

■ TATA NIAGA KEDELAI

Dilema Penjual Tempe Saat Kedelai Naik

JAKARTA. Para pengusaha tempe dan tahu mengeluhkan harga kedelai yang masih tinggi. Kondisi itu bisa merugikan masyarakat sebagai konsumen akhir. Padahal, tempe dan tahu adalah salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia.

Mengacu data Kementerian Perdagangan per 10 Januari 2022, harga kedelai di tingkat pengrajin berada di kisaran Rp 10.500 hingga Rp 10.750 per kilogram (kg). Angka itu meningkat 4,14% dibandingkan harga bulan sebelumnya.

Ketua Umum Gabungan Koperasi Pengusaha Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin mengatakan, tren kenaikan harga kedelai terjadi sejak tahun lalu.

Adapun negara penghasil kedelai terbesar di dunia adalah Amerika Serikat, Brazil dan beberapa negara Amerika Latin. Biasanya, panen kedelai pada Oktober-Desember. Idealnya, itu periode itu harga kedelai menurun. "Tapi karena ada kendala cuaca, panen terganggu sehingga harga kedelai global naik," ujar dia.

Faktor cuaca mempengaruhi suplai kedelai ke Indonesia. Negeri ini membutuhkan suplai kedelai 3 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, sekitar 2,6 juta ton di antaranya berasal dari impor, sementara sisanya dari petani kedelai lokal.

Dengan kenaikan harga kedelai, tentu harga jual tempe dan tahu di pasar akan naik. Gakoptindo memperkirakan, jika harga kedelai menembus Rp 10.000 per kg, maka penjual perlu mengerek harga tempe tahu di kisaran Rp 20.000-Rp 22.000 per kg.

Dia menambahkan, Gakoptindo sudah mengusulkan kepada pemerintah, terutama Kemendag agar membebaskan bea masuk impor kedelai ke Indonesia.

Ketua Primer Koperasi Pengrajin Tahu Tempe (Primkopti) DKI Jakarta, Sutaryo menilai, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor. "Namun itu mustahil, karena produksi dalam negeri tak cukup akibat keterbatasan lahan," kata dia.

Dimas Andri, Akmalal Hamdhi

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☒ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 14/1/2022
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 1/1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☒ Republika		☐ Pojok/Karikatur

Warga Berburu Minyak Goreng Murah

■ MUHAMMAD FAUZI RIDWAN,
DEDY DARMAWAN NASUTION

BANDUNG — Operasi pasar (OP) minyak goreng murah mulai digencarkan sejumlah pemerintah daerah. Warga pun berbondong-bondong menyerbu lokasi OP untuk mendapatkan minyak goreng seharga Rp 14 ribu per liter.

Hal tersebut seperti yang terlihat dalam pelaksanaan OP minyak goreng di Taman Dewi Sartika, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/1). Operasi pasar itu digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung.

Operasi pasar di Taman Dewi Sartika digelar dengan menggunakan sebuah tenda. Meski harus mengantre, warga tak mempermasalahkan itu demi mendapatkan minyak goreng murah.

BERITA TERKAIT

Pemerintah
Disarankan Buat
DMO Minyak Sawit

Dewi, salah seorang warga asal Jalan Cagak, Kota Bandung, mengatakan, dirinya sengaja datang ke Taman Dewi Sartika untuk membeli minyak goreng murah. Ia membeli sebanyak 2 liter minyak goreng dalam operasi pasar tersebut. "Lumayan, ada operasi minyak goreng murah. Harga (minyak) lagi mahal sekarang," kata Dewi, Kamis (13/1).

Dewi merasa terbantu dengan adanya penjualan minyak goreng murah. Ia berharap harga minyak goreng cepat turun agar tidak membebani masyarakat.

Hal serupa disampaikan Citra, warga Cibeunying Kidul, yang turut mencari minyak goreng murah dalam operasi pasar. Citra sangat berharap pemerintah bisa secepatnya menurunkan harga minyak goreng.

Menurut Citra, harga minyak goreng di pasar masih sangat mahal, yaitu mencapai Rp 23 ribu per liter. Sebagai pedagang, ia merasa terbantu

oleh operasi pasar minyak goreng murah. "Kalau di sini (operasi pasar—Red), harganya Rp 14 ribu. Saya yang jualan, seenggaknya ada keuntungan, *enggak* mencekik," katanya.

Ia mengatakan, kenaikan harga minyak goreng mulai terasa beberapa bulan lalu. Bahkan, ia sempat tidak berjualan karena lebih sering mengalami kerugian. "Saat harga dinaikkan, pembeli kabur," katanya yang sehari-hari berjualan makanan ringan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, operasi pasar minyak goreng akan diperluas dari saat ini di 11 kota/kabupaten menjadi 27 kota/kabupaten di Jawa Barat. Ia menuturkan, penyaluran minyak goreng dilakukan dengan berbagai cara untuk mengantisipasi kerumunan. "Ada dipusatkan di titik tertentu dan ada dikirim melalui kelurahan, sehingga warga cukup datang ke kantor desa kelurahan. Nanti di desa dilaksanakan operasi pasar," katanya.

Pria yang akrab disapa Emil ini mencontohkan, penyaluran minyak goreng melalui kelurahan dilakukan di Kota Bandung dengan tujuan meminimalkan potensi kerumunan. Ia berharap operasi pasar yang didukung Kementerian Perdagangan terus berlanjut karena harga minyak goreng masih mahal.

"Pantauan di lapangan, Rp 40 ribu per 2 liter. Diharapkan bisa kembali normal di level Rp 14 (ribu) sampai Rp 15 ribu per liter," katanya.

Di Kota Bogor, operasi pasar minyak goreng dilakukan sebanyak tiga kali pada pekan ini. Kepala Dinas Perdagangan Industri dan KUKM Kota Bogor Ganjar Gunawan mengatakan, operasi pasar telah dimulai sejak

Rabu (12/1). "Pelaksanaannya melibatkan beberapa produsen minyak goreng yang menjadi mitra Kementerian Perdagangan dan Disperindag Provinsi Jawa Barat," kata Ganjar.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga Pemerintah Kota Bogor, Mohamad Soleh, mengatakan, operasi pasar dengan 6.000 liter minyak goreng sudah digelar di Kecamatan Tanah Sereal pada Rabu. Adapun pada Kamis (13/1), operasi pasar dilakukan di Kecamatan Bogor Utara juga dengan minyak sebanyak 6.000 liter, lalu pada Jumat (14/1) dilaksanakan di Kecamatan Bogor Barat sebanyak 7.200 liter.

"Untuk pekan depan, pelaksanaan operasi pasar dilaksanakan di dua pasar, yakni Pasar Kebon Kembang dan Pasar Bogor dengan kapasitas sampai dengan 40 ribu liter," kata Soleh.

Di Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya menggelontorkan 14.400 ribu liter minyak goreng melalui operasi pasar pada Rabu kemarin. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem mengatakan, operasi pasar dilakukan hingga beberapa hari ke depan.

Operasi pasar minyak goreng antara lain dilaksanakan di Jalan Tambak Dukuh 1, RW 9, Kelurahan Kepusari, Kecamatan Genteng, dan Balai RW 3 di Jalan Peneleh Gang 3, Kelurahan Pene-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 14/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Ieh, Kecamatan Genteng, Surabaya.

Fauzie mengatakan, dalam operasi pasar, pihaknya bekerja sama dengan produsen atau distributor dari PT Mega Suryamas yang menyediakan 8.400 liter minyak goreng dan PT Smart sebanyak 6.000 liter. "Jadi, kami di-support oleh mereka, makanya harganya hanya Rp 14 ribu," kata Fauzie.

Ia menjelaskan, operasi pasar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Surabaya, terutama yang terdampak langsung kenaikan harga minyak goreng, seperti para pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Makanya kami batasi juga pembeliannya, maksimal setiap orang membeli 2 liter. Masing-masing pembeli juga harus membawa dan menyerahkan salinan KTP supaya tidak ada yang dobel pembeliannya."

Salah satu warga Tembok Dukuh, Nuraini, bersyukur karena adanya operasi pasar minyak goreng. Dia mengatakan, operasi pasar sangat bermanfaat, apalagi harga minyak goreng terus merangkak naik. "Alhamdulillah,

ada operasi pasar semacam ini, jadi lebih ringan," katanya.

Harus diperbanyak

Operasi pasar menjadi strategi pemerintah untuk menekan harga minyak goreng. Kementerian Perdagangan sebelumnya menyatakan, pemerintah menyiapkan 1,2 miliar liter minyak goreng bersubsidi selama enam bulan ke depan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menyarankan agar pemerintah memperbanyak jumlah minyak goreng bersubsidi. Menurut dia, jumlah yang tengah disiapkan pemerintah tidak akan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Operasi pasar bisa menurunkan harga, tapi apakah itu cukup? Perhitungan kami, itu tidak cukup," kata Rusli saat dihubungi *Republika*, kemarin.

Rusli menjabarkan, rata-rata konsumsi minyak goreng mencapai 0,94 liter per kapita per bulan. Dengan asumsi jumlah penduduk 238,9 juta penduduk usia 5-70 tahun yang memungkinkan mengonsumsi makanan

goreng, maka dibutuhkan sedikitnya 1,35 miliar liter selama enam bulan.

Adapun untuk menutup selisih harga minyak goreng yang ditanggung pemerintah untuk membayar minyak goreng agar dijual Rp 14 ribu per liter, nilainya bisa mencapai Rp 4,04 triliun. Namun, dana yang disiapkan pemerintah sekitar Rp 3 triliun atau cukup untuk 1,2 miliar liter. "Artinya, kurang 150 juta liter untuk enam bulan," kata Rusli.

Soal langkah lain yang lebih mendasar untuk dapat menurunkan harga minyak goreng, Rusli menilai pemerintah perlu memberikan subsidi secara langsung kepada produsen, bukan distributor. Pabrik yang telah memiliki fasilitas pengemasan tentu akan dengan mudah menjalankan program subsidi.

Untuk pabrik yang masih murni memproduksi minyak curah, ia berharap mereka dapat terdorong untuk melengkapi fasilitas pengemasan minyak goreng. "Saya kira itu langkah yang ideal," katanya. ■ shabrina zakaria ed: satrio kerika yudha

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|---|--|---|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL | 14/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 9/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

Langka, Pembelian Minyak Goreng Dibatasi

Pantauan tim MNC Portal Indonesia (MPI), di ritel modern di bilangan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, minyak goreng kemasan terlihat terbatas di rak penyimpanan. Di rak tersebut tertera pengumuman yang bertuliskan 'Batas Maksimal Pembelian Minyak Goreng Maksimal 2 Pcs per Konsumen'.

Salah seorang pegawai ritel yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, stok barang di gudang sudah menipis. Pihak ritel pun mengimbau untuk membatasi jumlah pembelian kepada konsumen.

"Minyak goreng lagi langka. Stok minyak tinggal segini aja. Di gudang sudah nggak ada lagi. Makanya, dibatesin," kata pegawai ritel saat bertemu MPI di lokasi, kemarin.

Minyak goreng yang terse-

dia di ritel tersebut terdiri atas beberapa merek. Harga jualnya mulai dari Rp19.700 hingga Rp30.500 per liter. Sementara untuk ukuran 2 liter hanya tersedia dengan banderol Rp42.300.

Ternyata, bukan minyak goreng kemasan saja yang langka, gula pasir juga demikian. Sampai-sampai terdapat keterangan imbauan, 'Pembelian Gula Maksimal 2 Pack per Konsumen'.

Pegawai ritel mengungkapkan, stok gula pasir yang bermerek buatan perusahaan sudah tidak ada alias habis. Yang tersisa hanyalah merek perusahaan ritel tersebut dengan harga Rp12.500 per kilogram (kg).

"Gula juga langka sekarang. Yang bermerek saja sudah nggak ada barangnya. Sisa ini

JAKARTA - Melonjaknya harga minyak goreng yang belum berangsur turun mengakibatkan ketersediaan barang menjadi langka. Tak pelak, ritel modern membatasi jumlah pembelian kepada konsumen.

saja yang merek sendiri. Itupun enggak banyak. Pembeli jadinya cuma boleh beli dua saja paling banyak," ujar pegawai ritel.

Rabu (11/2) lalu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan, program subsidi minyak goreng sebanyak 1,2 miliar liter akan diluncurkan pada pekan kedua Januari 2022. Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyebutkan, program 1,2 miliar liter minyak goreng disediakan pemerintah untuk enam bulan pertama di tahun ini.

Di Surabaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memantau harga minyak goreng di Pasar Wonokromo, Surabaya, dengan mendatangi sejumlah peda-

gang dan menanyakan langsung kepada pembeli terkait fluktuasi harga di pasar.

"Dalam tinjauan pasar hari ini, kami mengecek harga operasi pasar, khususnya minyak goreng. Tujuannya untuk mendukung kebijakan pemerintah menekan harga minyak goreng hingga level Rp14.000 per liter," ucap Menko Airlangga, di Pasar Wonokromo, Surabaya, kemarin.

Airlangga mengatakan, selain minyak goreng, operasi pasar juga digelar ke penjual ko-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL 14/11/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

moditas lain seperti beras, telur, dan bawang, yang didukung Perum Bulog serta Pemprov Jawa Timur.

Ketua Umum Golkar ini berharap dengan adanya regulasi yang mengatur harga, pekandapan harga minyak goreng diharapkan sudah berada di level Rp14.000. "Mudah-mudahan pekan depan harga minyak goreng sudah di level Rp14.000 melalui kebijakan stabilisasi harga dengan menggelar operasi pasar," kata Airlangga.

Salah satu pedagang Pasar Wonokromo, Musdalifa, mengakui harga minyak goreng yang dijual pedagang bervariasi, tetapi rata-rata berada di atas Rp20.000.

Musdalifa yang juga sempat ditemui Airlangga Hartarto di Pasar Wonokromo. Dia menyebutkan harga minyak goreng yang dijual pedagang antara

Rp22.000 hingga Rp26.000. "Untuk hari ini yang membeli minyak goreng dan masuk ke dalam Pasar Wonokromo masih sepi, Mas, karena pembeli tersekap operasi pasar yang digelar pemerintah di luar pasar dengan harga rerata Rp14.000," kata pedagang yang sudah belasan tahun berdagang di Pasar Wonokromo tersebut.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mempertanyakan komitmen pengusaha dalam menjaga stabilitas stok dan harga minyak goreng di tingkat eceran. Hal tersebut berdasarkan pengakuan dari para konsumen di Pasar Alang-Alang Lebar Palembang di mana setiap 1 liter minyak goreng dalam kemasan dijual Rp22.000.

Padahal, harga eceran tertingginya jauh di bawah harga tersebut. Untuk itulah, dia me-

mintanya pengusaha perkebunan sawit agar mengutamakan pasar lokal, bukan hanya soal ekspor.

"Sumsel ini merupakan penghasil CPO sampai 6 juta ton untuk ekspor. Akan tetapi, masyarakat yang ingin membeli minyak goreng justru mahal," ujar Deru, di sela memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Alang-Alang Lebar, Rabu (22/1).

Dari pantauan di pasar tradisional tersebut, ratusan warga tampak memadati operasi pasar minyak goreng, beras, dan gula di Pasar Alang-alang Lebar Palembang. Langkah tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengembalikan harga normal sesuai harga eceran atau HET, yaitu Rp11.000.

advenia elisabeth/dede febriansyah/MNC Media

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 14/11/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☒ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

TAJUK

Ironi Harga Minyak Goreng

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan, upaya penyaluran 11 juta liter minyak goreng seharga Rp 14 ribu per liter akan terus dilanjutkan. Program pemerintah untuk menekan tingginya harga minyak goreng di pasaran tersebut, rencananya dengan memasok sebanyak 11 juta liter ke pasar. Sampai awal pekan ini, penyaluran minyak goreng tersebut telah mencapai 4,5 juta.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN), secara nasional harga minyak goreng curah pada 29 Desember 2021 Rp 18.400 per kilogram (kg). Pada awal pekan ini harga sekitar Rp 18.550 per kg. Sedangkan harga minyak goreng kemasan bermerek 1, pada 30 Desember 2021, yakni Rp 20.600 per kg. Sementara awal pekan ini, menjadi Rp 20.800 per kg. Begitu juga, minyak goreng kemasan bermerek 2, pada 30 Desember masih Rp 20.030 per kg, awal pekan ini menjadi Rp 20.300 per kg. **R. 4**

Ketidakmampuan operasi pasar minyak goreng seharga Rp 14 ribu per liter dalam menurunkan harga seperti menggaransi air laut. Sampai saat ini, harga minyak goreng di pasaran masih sangat tinggi. Padahal, kenaikan harga minyak goreng sudah terjadi dalam dua bulan terakhir ini.

Tidak hanya soal harga tinggi yang dikeluhkan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang kesulitan menemukan tempat untuk membeli minyak goreng subsidi Rp 14 ribu per liter tersebut. Walhasil, program harga minyak goreng subsidi akhirnya hanya bisa dinikmati sebagian kecil masyarakat.

Belum lagi, kebijakan pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga minyak goreng dengan mekanisme operasi pasar dikategorikan masih sangat tradisional. Tak heran bila gelontoran minyak goreng dengan harga Rp 14 ribu per liter belum memberi pengaruh yang berarti terhadap penurunan harga.

Bagi Indonesia, harga minyak goreng yang melambung tinggi sesungguhnya sangat ironis. Sebagai negara nomor satu penghasil minyak sawit mentah (CPO)--yang menjadi bahan baku produksi minyak goreng-- di dunia, tidak berdayanya pemerintah menahan laju kenaikan harga minyak goreng

sangat disayangkan. Padahal, bahan baku pembuat minyak goreng semuanya ada di dalam negeri.

Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, pada 2020, produksi CPO Indonesia mencapai 46 juta ton. Dari jumlah itu, 43 persen di antaranya untuk konsumsi dalam negeri, sisanya diekspor. Dari angka ini, 8,6 juta ton untuk pangan dalam negeri dan 18,4 juta ton untuk pangan ekspor. Sementara untuk energi (biodiesel), 10,5 juta ton buat dalam negeri dan 0,5 juta ton ekspor. Sisanya untuk industri lain, seperti *oleochemicals*.

Kita ketahui, persoalan utamanya saat ini adalah Indonesia memang pengeksport CPO terbesar di dunia, tapi terkait harga CPO justru didikte Rotterdam untuk pasar *spot* dan Kuala Lumpur untuk harga kontrak berjangka. Itulah penyebab Indonesia seakan tidak berdaya terhadap adanya kenaikan CPO sebagai bahan baku minyak goreng.

Selama ini, pabrik-pabrik minyak goreng berbasis sawit di Indonesia membeli CPO di pasar lelang di Dumai, yang terkoneksi dengan harga di Rotterdam, Belanda. Ketika harga CPO di pasar lelang Rotterdam melonjak, dengan sendirinya di pasar lelang Dumai pun harganya mengikuti.

Belakangan ini, harga CPO berada di level tinggi. Dari November 2020 hingga November 2021, harga CPO di pasar global naik 52,23 persen. Bahkan, harga lelang CPO November 2021 sempat menyentuh di atas 1.400 dolar AS per ton.

Harga CPO yang tinggi tersebut menjadi biang keladi kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri. Karena itu, bukan saatnya lagi pemerintah hanya memainkan instrumen tradisional, dengan operasi pasar untuk menurunkan harga minyak goreng.

Sebab, potensi kenaikan harga CPO masih terjadi, seiring penurunan produksi CPO di pasar global dan jalur distribusi masih belum selancar seperti sebelum pandemi. Pemerintah harus memainkan perannya lebih besar dalam komoditas CPO sehingga dapat ikut mendikte pasar bukan hanya seperti penonton seperti saat ini. Kalau pemerintah masih hanya mengandalkan instrumen menjual minyak goreng dengan harga murah, yang volumenya hanya sebagian kecil dari kebutuhan minyak goreng nasional, masyarakat akan terus dihadapkan pada harga minyak goreng yang tinggi. ■